

Daftar Pustaka

Buku Literatur

- Abdurrahman. 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amal, Bakhrul. 2017. *Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Penerbit Thafa Media Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta : Tata Nusa.
- Harsono, Boedi. 1995. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta : Djembatan.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indroharto. 2000. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardiprapto. 1975. *Hukum Agraria di Indonesia*. Purwokerto:Universitas Jenderal Soedirman.
- MD, Moh.Mahfud. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- MD, Moh. Mahfuddan SF. Marbun.2009. *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Airlangga.
- Parlindungan, AP. 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1991. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*.Yogyakarta: Tugu Jogja.

- Suandra, I Wayan. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Supriadi. 2008. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Yusriadi. 2010. *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas tanah dan Benda Benda yang ada di atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan

Sumber Lainnya :

Dekie GG Kasenda. 2015. Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Morality. Vol. 2 No. 2: hlm. 15.

Hadjon, Philipus M. Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm. 112.

Mohammad Mulyadi. 2017. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah. Aspirasi. Vol. 8 No. 2: hlm. 155.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019

Rahayu Subekti. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2: hlm. 389.

Rahmah Hidayati. 2016. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014). JOM FISIP. Vol. 3 No. 2: hlm. 4.

